

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2021. *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajagrafindo Pers.
- Adrian Djatiwinat. 2022. *Memahami Delik Aduan. Tuntutan Balik. Bukti Persidangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan.
- Agus Sudarto. 2023. *Prinsip-Prinsip Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Hukum Indonesia.
- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ahmad Hidayat. 2024. *Penerapan Prinsip Penyertaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Ananda. 2024. *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Jakarta: Gramedia Literasi.
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan, dkk, 2014, *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Jakarta : Kencana.
- Amir Ilyas. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang education dan Republik institute.
- Ari Dharmawan. 2025. *Restorative Justice dan Pemidanaan Berbasis Pemulihan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Asep Benia. 2023. *Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Budi Prasetyo. 2014. *Teori dan Praktik Pidana Penyertaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Budi Santoso. 2022. *Perlindungan Hukum sebagai Pilar Keadilan dalam Proses Penyelesaian Sengketa*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Budi Setiono. 2023. *Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Universitas Pasundan Press.
- Chandra Gita Dewi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish.
- D. Schaffmeister, dkk., 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- DJKI. 2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI*. Jakarta: DJKI.
- Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hakim. 2025. *Peran Aktif Hakim dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah Hatrick. 1995. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hery Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Ilham Rahman. 2023. *Teori Kepastian Hukum dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iman Sjahputra. 2021. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- J. Saragih. 2024. *Tujuan Pemidanaan dan Keadilan Restoratif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Johannes Saragih. 2024. *Tujuan Pemidanaan dan Keadilan Restoratif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ketut Artadi Putra. 2021. *Perlindungan Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Kurniawan. 2023. *Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muhammad Rizqy. 2021. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia". *LEX Renaisan* 6 no. 1: 108.
- Mukhlis. 2015. *Hukum Pidana*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mukhlis. 2015. *Hukum Pidana*. Aceh: Syiah Kuala University Press.

- Mukti Arto. 2024. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pratiwi. 2023. *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Jakarta: Universitas Krisnadwipayana.
- R. Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soekardono. 1993. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- S. Mandagi. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saragih Johannes. 2024. *Teori Pidanaan dan Proporsionalitas Sanksi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sari Pratiwi. 2022. *Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Siswantari Pratiwi. 2023. *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Universitas Krisnadwipayana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet-13*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar). Edisi Kedua (Cetakan Kedua)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

JURNAL

- Andini Dwi Safitri. (2025). "Penanganan Pelaku Penyerta Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan". *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8. no. 1: 15.
- André, dkk., (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perlindungan Merek". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 49. no. 1: 5.
- Dziky Saeful Rohim. (2021). "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Indonesia". *Jurnal Mediasi* 3. no. 1: 2.

- Y. Arafat. (2025). "Penyelesaian Perkara Delik Aduan dengan Mediasi Penal". *Borneo Law Review* 7. no. 2: 14.
- D.S. Rohim. (2021). "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* 9. no. 2: 4.
- Dahlani, dkk., (2025). "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia". *Journal of Dual Legal Systems* 2. no. 1: 53.
- Deni Pratama. (2025). "Tindak Pidana dan Penyidikannya di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10. no. 4: 14.
- Denny, dkk., (2022). "Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia". *Jurnal Sapientia et Virtus* 7. no. 2: 149.
- F. Sjawie, Hasbullah, "Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" Jakarta : Kencana. 2017.
- Martha Vivy. (2024). "Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaiannya atau Kesalahannya yang Mengakibatkan Perseroan Pailit". *Jurnal Hukum Korporasi* 3. no. 1: 7-12.
- Mulyadi. (2024). "Tantangan dan Kendala Implementasi Mediasi Penal di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum* 9. no. 1: 9.
- Neliti. (2025). "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Merek". *Jurnal Hukum dan Keamanan* 7. no. 2: 13.
- NMT. Dewi. (2022). "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Hukum." *Jurnal Administrasi Hukum* 4. no. 2: 47.
- Palendeng, dkk., 2023. "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual". *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Hukum. & Pengajarannya*.
- Petrus Jamba. (2024). "Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia". *Jurnal Cahaya Keadilan* 3. no. 1: 37.
- Pratama. (2025). "Tindak Pidana dan Penyidikannya di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10. no. 4: 14.
- R.J. Purba. (2025). "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana". *Jurnal Sosialisasi Hukum* 5. no. 5: 13.
- Rian Oktafianto. (2025). "Urgensi Penerapan Konsep Penyertaan dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 25. no. 5: 15.

Taqiuddin, dkk., (2022). "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6. no. 1: 3596-3600

Tutuarima, dkk., (2025). "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual". *Journal of Dual Legal Systems* 2. no. 2: 105.

Yoga Gunawan. (2022). "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum". *Iblaw Law Review* 2. no. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD NRI Tahun 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

WEBSITE

[Indonesia Masih Bertahan Di Priority Watch List - K&K Advocates \(kk-advocates.com\)](#)

Renchmark. 2024. *Belajar Dari Sengketa Sarung Gajah Duduk: Dipidana Karena Hak Atas Merek Tidak Dialihkan*. [Renchmark.co.id](#).

[Mediasi Berbuah Damai, Pelanggaran Merek "Haes" di Gowa Tuntas](#)

Lainnya

Aldi Fermansyah. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Alifa Wiranisa. 2023. *"Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/PID.SUSANAK/2020/PN. Tjk)"*. Skripsi. Universitas Lampung.

Arti kata merek - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

D. Dharmawati. 2024. Disertasi Mediasi Penal sebagai Pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa." Universitas Hasanuddin.

Dharmawati. 2024. *Disertasi Mediasi Penal sebagai Pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Djatiwinata. 2022. *Memahami Delik Aduan. Tuntutan Balik. Bukti Persidangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian Keuangan.

DJKI. 2025. *Layanan Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Mediasi dan Arbitrase*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Ferdiyansyah Ariesta Intama. 2018. "*Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu)*". Skripsi. Universitas Lampung.

Hermansyah. 2025. *DJKI Tekankan Prinsip First to File dalam Pelindungan Merek*. Kalbar Kemenkumham. 24 Februari.

Ismail Rumadan. 2018. *Kriteria Itikad Tidak Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Universitas Nusa Cendana. 2024. *Buku PPGTP: Tindak Pidana Penyertaan*. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.